

Strategi Tata Kelola Aset Idle Daerah untuk Penguatan Kemandirian Fiskal Provinsi Sumatera Selatan

Shella Inkasari^{1*}

¹ Universitas Indo Global Mandiri Palembang, Indonesia Afiliasi ; shellainka929@gmail.com *

ABSTRAK

Optimalisasi aset idle menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), namun masih ditemukan aset yang belum dimanfaatkan secara optimal di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab munculnya aset idle serta merumuskan strategi optimalisasi aset idle di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan penelusuran data sekunder yang bersumber dari peraturan pengelolaan aset daerah, dokumen resmi pemerintah, dan laporan hasil pemeriksaan. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yang diperkuat dengan analisis SWOT untuk menentukan strategi optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset idle di Provinsi Sumatera Selatan didominasi oleh tanah dan bangunan yang belum dimanfaatkan secara optimal akibat lemahnya perencanaan kebutuhan aset, permasalahan legalitas, keterbatasan anggaran pemeliharaan, dan rendahnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah. Strategi optimalisasi yang direkomendasikan meliputi digitalisasi pengelolaan aset, percepatan sertifikasi dan audit legal, penataan administrasi berbasis data terintegrasi, serta pengembangan skema pemanfaatan melalui sewa, kerja sama pemanfaatan, dan pihak ketiga. Kesimpulannya, optimalisasi aset idle secara sistematis dan berkelanjutan berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, mendorong investasi, dan mendukung pembangunan daerah yang berbasis tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata kunci : Aset Idle, Barang Milik Daerah, Optimalisasi Aset, Strategi, Sumatera Selatan

ABSTRACT

optimization of idle assets is an important strategy to improve regional fiscal independence through the utilization of Regional Property (BMD); however, several assets in South Sumatra Province remain underutilized. This study aims to identify the causes of idle assets and formulate optimization strategies for idle assets in South Sumatra Province. The research employed a descriptive qualitative approach using documentation studies and secondary data tracing derived from regional asset management regulations, official government documents, and audit reports. Data analysis was conducted using an interactive analysis model involving data reduction, data display, and conclusion drawing, supported by SWOT analysis to determine optimal strategies. The findings reveal that idle assets in South Sumatra Province are predominantly land and buildings that have not been optimally utilized due to weak asset planning, legal issues, limited maintenance budgets, and poor coordination among regional government organizations. Recommended optimization strategies include the digitalization of asset management systems, acceleration of certification and legal audits, restructuring of administration based on integrated data, and the development of utilization schemes through leasing, utilization cooperation, and third-party involvement. In conclusion, the systematic and sustainable optimization of idle assets has the potential to increase Regional Original Revenue, encourage investment, and support regional development based on good governance.

Keywords : Asset Optimization, Idle Assets, Regional Property, South Sumatra, Strategy

Pendahuluan/ Introduction

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola berbagai urusan pemerintahan, termasuk pengelolaan sumber daya ekonomi dan keuangan daerah sebagai upaya meningkatkan kemandirian fiskal. Kebijakan ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan potensi ekonomi wilayah. Dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih besar dalam menentukan kebijakan pembangunan, mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.

Salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan sumber pendapatan yang berasal dari potensi ekonomi daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber penerimaan lain yang sah. Kemampuan daerah dalam mengoptimalkan PAD mencerminkan tingkat kemandirian fiskal yang dimiliki sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Semakin besar PAD yang diperoleh, maka semakin tinggi pula kapasitas pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan (Raya et al., n.d.).

Dalam konteks tersebut, pengelolaan aset daerah menjadi salah satu instrumen strategis untuk meningkatkan kontribusi terhadap PAD. Aset daerah merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah dan memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan apabila dikelola secara optimal. Pengelolaan aset mencakup serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, hingga pengawasan dan pengendalian aset secara sistematis dan berkelanjutan (Anartany & Suseno, 2018). Pengelolaan aset yang baik menjadi bagian penting dari prinsip good governance karena mampu menciptakan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD). Selain itu, kualitas sumber daya manusia aparatur juga menentukan keberhasilan administrasi serta optimalisasi pemanfaatan aset pemerintah (B. Jurnal et al., 2018).

Pada tingkat pemerintah daerah, pengelolaan aset dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah. BPKAD memiliki fungsi strategis dalam perencanaan, penatausahaan, pemanfaatan, hingga pelaporan aset daerah agar pengelolaan berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Di Provinsi Sumatera Selatan, pengelolaan aset menjadi semakin strategis seiring meningkatnya aktivitas ekonomi di sektor perdagangan, industri, pertanian, dan pembangunan infrastruktur. Posisi Palembang sebagai pusat aktivitas ekonomi memberikan peluang besar bagi pemerintah

daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset guna memperkuat kapasitas fiskal dan meningkatkan PAD.

Namun demikian, pengelolaan aset daerah masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah keberadaan *idle assets* atau aset menganggur, yaitu aset milik pemerintah yang belum dimanfaatkan atau tidak digunakan sesuai peruntukannya. Kondisi tersebut menyebabkan aset tidak memberikan kontribusi terhadap pelayanan publik maupun peningkatan pendapatan daerah, bahkan berpotensi menjadi beban anggaran karena memerlukan biaya pemeliharaan dan perawatan (Made et al., n.d.). Permasalahan aset idle dapat berupa tanah kosong, bangunan tidak terpakai, maupun fasilitas publik yang berada di kawasan kurang produktif. Selain menyebabkan inefisiensi, aset yang tidak dikelola secara optimal juga rentan terhadap penyalahgunaan, sengketa hukum, penurunan nilai ekonomi, serta lemahnya pengawasan administratif (Manajemen, 2024).

Berbagai faktor diduga menjadi penyebab munculnya aset idle, antara lain lemahnya perencanaan kebutuhan aset, inventarisasi dan pendataan yang belum optimal, permasalahan legalitas seperti aset yang belum bersertifikat, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, serta kurangnya koordinasi antarperangkat daerah. Padahal, regulasi pengelolaan Barang Milik Daerah telah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan optimalisasi aset melalui berbagai skema pemanfaatan seperti sewa, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah (*build operate transfer*), maupun bentuk kerja sama lain yang sah. Optimalisasi aset idle dipandang mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi, meningkatkan PAD, mendorong investasi, membuka lapangan kerja, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik (Syariah & Hellyanita, 2025).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa manajemen aset memiliki pengaruh signifikan terhadap optimalisasi aset daerah dan peningkatan pendapatan pemerintah daerah (B. Jurnal et al., 2018). Selain itu, pengelolaan aset yang efektif memerlukan sistem pengendalian yang kuat agar aset dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tidak menjadi beban fiskal pemerintah (Ibrahim & Ridwan, 2020). Namun demikian, penelitian sebelumnya masih lebih banyak membahas manajemen aset secara umum dan belum secara spesifik mengkaji strategi optimalisasi aset idle pada tingkat pemerintah provinsi. Di samping itu, masih terbatas penelitian yang mengintegrasikan aspek digitalisasi pengelolaan aset, audit legalitas, serta kerja sama pemanfaatan aset dalam satu kerangka strategi tata kelola yang terintegrasi. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menunjukkan perlunya kajian lebih mendalam mengenai strategi optimalisasi aset idle yang kontekstual pada pemerintah provinsi, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab beberapa rumusan masalah, yaitu: (1) apa faktor penyebab munculnya aset idle di Provinsi Sumatera Selatan; (2) bagaimana hambatan pengelolaan aset idle di Provinsi Sumatera Selatan; dan (3) strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan aset idle agar lebih produktif dan berkontribusi terhadap peningkatan PAD. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab munculnya aset idle, menganalisis hambatan pengelolaan, serta merumuskan strategi optimalisasi aset yang efektif dan berkelanjutan.

Secara akademik, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas kajian pengelolaan aset daerah, khususnya terkait optimalisasi aset idle pada tingkat pemerintah provinsi yang masih relatif terbatas dibahas dalam penelitian sebelumnya. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi strategi pengelolaan aset melalui penguatan inventarisasi dan

digitalisasi data aset, audit legalitas aset, serta pengembangan skema kerja sama pemanfaatan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk meningkatkan produktivitas aset daerah, memperkuat PAD, dan mendorong kemandirian fiskal daerah.

Metode/Method

ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman secara mendalam mengenai fenomena pengelolaan aset idle pemerintah, khususnya terkait faktor penyebab munculnya aset idle. Dalam proses pengelolaan suatu sistem atau kegiatan, sering kali terdapat berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan. Hambatan tersebut bisa muncul dari faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi efektivitas pengaturan atau manajemen. Oleh karena itu, diperlukan berbagai langkah atau strategi pengoptimalan yang dapat diterapkan secara tepat guna untuk meningkatkan kinerja pengelolaan. Strategi ini bertujuan agar setiap kendala yang muncul dapat diminimalisasi, sehingga proses pengelolaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan menghasilkan output yang maksimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pengelolaan aset idle pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, khususnya informasi dan data yang berkaitan dengan pemanfaatan aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Batasan objek penelitian difokuskan pada aset idle milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta strategi optimalisasi yang dilakukan melalui studi dokumentasi internet (online research). Penelitian ini membatasi kajian pada identifikasi penyebab munculnya aset idle, hambatan pengelolaan, dan upaya optimalisasi aset berdasarkan data administratif serta regulasi terkait.

Asal informasi kajian terdiri dari informasi utama serta informasi pendukung. Informasi utama digital didapatkan lewat keterangan laporan perkembangan dari instansi terkait yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, seperti daftar Barang Milik Daerah (BMD), laporan hasil pemeriksaan, regulasi, serta dokumen lain yang relevan dengan pengelolaan aset daerah.

Metode pengumpulan informasi dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Proses ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar dalam melakukan analisis lebih lanjut. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagai teknik, seperti observasi langsung di lapangan untuk melihat fenomena secara nyata, wawancara untuk mendapatkan informasi mendalam dari responden, serta dokumentasi untuk melengkapi data yang sudah ada. Dengan menggunakan berbagai cara tersebut, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh bersifat lengkap, valid, dan mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya di lapangan. studi dokumentasi internet (online research), yaitu dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menelaah dokumen elektronik, laporan resmi, regulasi, serta informasi pendukung lainnya yang relevan dengan pengelolaan aset idle Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Metode kajian informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pola analisis yang bersifat interaktif dan saling berhubungan antar prosesnya. Proses tersebut

mencakup tiga tahapan utama, yaitu penyederhanaan data untuk memilah informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk yang lebih sistematis agar mudah dipahami, serta pengambilan kesimpulan yang dilakukan berdasarkan hasil interpretasi data yang telah dianalisis secara menyeluruh. Dengan demikian, proses analisis data tidak berjalan secara terpisah, tetapi berlangsung secara berkesinambungan dan saling mempengaruhi satu sama lain hingga diperoleh hasil penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengelompokkan data berdasarkan tema utama, seperti penyebab munculnya aset idle, kendala pengelolaan, dan strategi optimalisasi aset. Selanjutnya, digunakan analisis SWOT untuk merumuskan strategi optimalisasi yang tepat melalui identifikasi faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengelolaan aset idle di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang sistematis dan komprehensif mengenai strategi optimalisasi aset idle pemerintah daerah.

Hasil dan Pembahasan/ Result and Discussion

1.1 Identifikasi dan Karakteristik Aset Idle di Provinsi Sumatera Selatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset idle masih menjadi tantangan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Provinsi Sumatera Selatan. Aset idle merupakan aset negara atau daerah yang dimiliki namun tidak digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan maupun pelayanan publik. Aset tersebut umumnya berupa tanah, bangunan, kendaraan dinas, serta sarana dan prasarana yang tidak lagi dimanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan hasil inventarisasi, aset idle di Provinsi Sumatera Selatan mayoritas berupa tanah yang belum dimanfaatkan secara optimal, bangunan yang tidak digunakan, serta sarana dan prasarana bekas proyek pemerintah yang telah berhenti beroperasi. Kondisi ini menyebabkan rendahnya tingkat pemanfaatan aset dan berpotensi menimbulkan penurunan nilai ekonomis apabila tidak segera dilakukan pengelolaan yang tepat.

Tabel 1. Karakteristik Aset Idle di Provinsi Sumatera Selatan

Jenis Aset	Kondisi Pemanfaatan	Permasalahan
Tanah	Belum dimanfaatkan optimal	Legalitas dan sertifikasi
Bangunan	Tidak digunakan	Kerusakan fisik
Kendaraan dinas	Kurang optimal	Penumpukan aset
Sarana/prasarana eks proyek pemerintah	Tidak difungsikan	Perubahan kebijakan

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2026

Tabel di atas menggambarkan karakteristik aset idle di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu aset milik pemerintah daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal sehingga tidak memberikan kontribusi maksimal terhadap pelayanan maupun pendapatan daerah. Pertama, aset berupa tanah masih berada dalam kondisi belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya permasalahan terkait legalitas dan sertifikasi, sehingga status hukum

aset belum sepenuhnya jelas atau belum siap digunakan untuk kegiatan produktif seperti pembangunan atau kerja sama pemanfaatan.

Kedua, aset bangunan berada dalam kondisi tidak digunakan. Kondisi ini umumnya terjadi karena kerusakan fisik, seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, membutuhkan renovasi besar, atau tidak lagi sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga dibiarkan tidak berfungsi. Ketiga, kendaraan dinas juga termasuk aset yang kurang optimal pemanfaatannya. Permasalahan utama yang terjadi adalah penumpukan aset, yaitu jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan kebutuhan operasional, sehingga sebagian kendaraan menjadi tidak terpakai atau hanya tersimpan tanpa digunakan secara efektif.

Keempat, sarana dan prasarana eks proyek pemerintah mengalami kondisi tidak difungsikan. Hal ini disebabkan oleh perubahan kebijakan, sehingga fasilitas atau infrastruktur yang sebelumnya dibangun untuk tujuan tertentu tidak lagi relevan atau tidak digunakan sesuai rencana awal. Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa berbagai jenis aset daerah masih menghadapi kendala pemanfaatan yang berbeda-beda, mulai dari aspek hukum, kondisi fisik, manajemen aset, hingga perubahan kebijakan. Kondisi ini menegaskan perlunya strategi optimalisasi agar aset idle tersebut dapat kembali dimanfaatkan secara produktif dan memberikan nilai ekonomi maupun manfaat bagi pemerintah daerah.

Beberapa bangunan yang teridentifikasi sebagai aset idle antara lain eks proyek rehabilitasi gedung dinas kesehatan Sumatera Selatan dan bangunan yang mengalami penurunan fungsi akibat perubahan kebutuhan organisasi perangkat daerah (OPD). Selain itu, ditemukan pula penumpukan aset daerah yang memerlukan langkah optimalisasi melalui kerja sama antarlembaga. Kondisi tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2016 yang menjelaskan bahwa aset idle merupakan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengguna barang. Definisi ini menunjukkan bahwa aset yang tidak digunakan secara produktif perlu dilakukan penataan agar memberikan manfaat ekonomi maupun sosial.

a. Hambatan Pengelolaan Aset Idle

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset idle menghadapi sejumlah hambatan administratif, teknis, dan hukum. Secara administratif, proses penghapusan atau pemanfaatan aset memerlukan prosedur yang panjang dan persyaratan yang kompleks sehingga memperlambat proses optimalisasi. Secara teknis, beberapa aset berada dalam kondisi rusak berat sehingga memerlukan biaya rehabilitasi tinggi sebelum dapat dimanfaatkan kembali. Selain itu, hambatan legalitas menjadi faktor dominan dalam pengelolaan aset idle. Permasalahan seperti sertifikasi tanah, sengketa lahan, dan status hukum kepemilikan sering kali menghambat proses pemanfaatan. "Pengelolaan aset idle cukup sulit dilakukan karena banyak aset yang belum memiliki legalitas lengkap serta membutuhkan proses administrasi yang panjang sebelum dapat dimanfaatkan kembali." (Hasil Wawancara, April 2026) Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa pengelolaan aset idle sering terkendala aspek legalitas, keterbatasan anggaran pemeliharaan, serta lemahnya perencanaan kebutuhan aset jangka panjang.

1.2 Strategi Optimalisasi Aset Idle di Provinsi Sumatera Selatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan berbagai strategi dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset idle melalui inventarisasi aset, penertiban administrasi, dan peningkatan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah. Upaya ini bertujuan meningkatkan nilai guna serta nilai ekonomi aset yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

Strategi optimalisasi dilakukan melalui pembaruan data aset secara berkala dan pelaksanaan sertifikasi tanah untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan aset pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah mulai menerapkan mekanisme pemanfaatan aset berupa sistem sewa, kerja sama pemanfaatan, serta skema kemitraan dengan pihak ketiga.

Tabel 2. Strategi Optimalisasi Aset Idle di Provinsi Sumatera Selatan

Strategi	Bentuk Implementasi	Tujuan
Inventarisasi aset	Pembaruan data administrasi	Akurasi data aset
Sertifikasi aset	Legalisasi kepemilikan tanah	Kepastian hukum
Kerja sama pemanfaatan	Sewa dan kemitraan	Peningkatan nilai ekonomi
Koordinasi lintas sektor	Kolaborasi OPD dan instansi terkait	Efektivitas pengelolaan

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2026

Strategi yang diterapkan dalam pengelolaan aset tersebut menunjukkan adanya pergeseran pendekatan dari sekadar kegiatan administratif menuju arah yang lebih strategis, yaitu optimalisasi nilai guna dan nilai ekonomi aset secara berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan aset tidak lagi hanya berfokus pada pencatatan, pendataan, dan pelaporan semata, tetapi juga pada upaya bagaimana aset tersebut dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah serta mendukung efektivitas pembangunan. Pandangan ini sejalan dengan konsep optimalisasi aset yang menekankan bahwa aset harus dikelola secara menyeluruh untuk memaksimalkan seluruh potensi yang dimilikinya, baik dari segi lokasi, nilai ekonomis, kepastian hukum, maupun manfaat sosial yang dapat dihasilkan. Melalui pendekatan tersebut, aset yang sebelumnya tidak produktif dapat diubah menjadi sumber daya yang memiliki nilai tambah, sehingga tidak hanya menjadi beban pengelolaan, tetapi juga menjadi aset yang produktif dan bernilai guna tinggi.

Sebagai perbandingan, praktik serupa dalam pemanfaatan aset tidak terpakai juga telah diterapkan di berbagai negara. Salah satu contohnya adalah kebijakan Pemerintah Belanda yang berhasil merevitalisasi bangunan bekas penjara di Utrecht Wolvenplein. Bangunan tersebut yang sebelumnya tidak lagi difungsikan sebagai fasilitas pemasyarakatan, kemudian dialihfungsikan menjadi ruang perkantoran serta area usaha seperti restoran pop-up. Transformasi ini menunjukkan bahwa aset yang sudah tidak memiliki fungsi awalnya tetap dapat dihidupkan kembali melalui inovasi pengelolaan dan kreativitas pemanfaatan. Pengalaman tersebut memberikan gambaran bahwa optimalisasi aset idle sangat bergantung pada kemampuan pemerintah atau pengelola dalam melihat peluang baru dari aset yang ada. Dengan pendekatan yang inovatif, aset tidak produktif dapat diubah menjadi sumber aktivitas ekonomi baru yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga menciptakan nilai sosial dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan aset secara keseluruhan

a. Digitalisasi Pengelolaan Aset

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi menjadi strategi penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan aset idle. Sistem informasi yang terintegrasi dapat membantu pemerintah memperoleh data aset yang lebih akurat, transparan, dan mudah diakses. Digitalisasi mempermudah proses pengawasan, evaluasi, serta perencanaan kebutuhan aset di masa mendatang sehingga potensi terjadinya penumpukan aset dapat diminimalkan. "Penggunaan sistem digital diperlukan agar data aset lebih mudah dipantau dan pengambilan keputusan terkait pemanfaatan aset dapat dilakukan secara cepat dan tepat." (Hasil Wawancara, April 2026) Temuan ini sesuai dengan konsep strategi organisasi yang menekankan pentingnya perencanaan jangka panjang dan penyusunan tindakan sistematis untuk mencapai tujuan secara efektif.

b. Audit Legal dan Kolaborasi Pemanfaatan Aset

Selain digitalisasi, audit legal secara berkala menjadi strategi penting untuk memastikan seluruh aset memiliki dokumen kepemilikan yang jelas dan terhindar dari sengketa hukum. Audit ini diperlukan untuk mengurangi hambatan legalitas yang selama ini menghambat optimalisasi aset. Pemerintah daerah juga melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk instansi teknis dan sektor swasta, guna meningkatkan nilai guna aset melalui pola kerja sama pemanfaatan yang sesuai dengan karakteristik aset.



Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2026

Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi aset idle tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan menyeluruh yang melibatkan aspek administrasi, hukum, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.3 Analisis Kesesuaian dengan Teori dan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesesuaian dengan teori optimalisasi aset yang dikemukakan oleh Siregar (2004), yang menyatakan bahwa optimalisasi aset bertujuan memaksimalkan potensi lokasi, legalitas, nilai ekonomi, dan manfaat aset. Dalam konteks penelitian ini, strategi inventarisasi, legalisasi aset, dan kerja sama pemanfaatan menjadi

bentuk implementasi teori tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mendukung temuan penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa pengelolaan aset idle umumnya menghadapi hambatan berupa legalitas, rendahnya kualitas data aset, keterbatasan anggaran pemeliharaan, dan lemahnya koordinasi antarinstansi.

Namun demikian, terdapat perbedaan pada konteks implementasi. Pada Provinsi Sumatera Selatan, strategi optimalisasi lebih banyak diarahkan pada inventarisasi ulang, digitalisasi sistem pengelolaan aset, dan kolaborasi dengan instansi seperti Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) guna mempercepat pemanfaatan aset yang tidak produktif. Dengan demikian, aset idle di Provinsi Sumatera Selatan berpotensi menjadi sumber daya strategis daerah apabila dikelola melalui perencanaan yang matang, pengawasan yang konsisten, serta pemanfaatan berbasis nilai ekonomi dan kepentingan publik.

Kesimpulan/ Conclusion

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak faktor struktural dan administratif, termasuk perencanaan yang buruk untuk kebutuhan aset, penatausahaan dan inventarisasi barang milik daerah yang tidak optimal, masalah legalitas seperti sertifikasi dan sengketa lahan, dan keterbatasan anggaran pemeliharaan, memengaruhi jumlah aset idle di Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, jika organisasi perangkat daerah tidak bekerja sama dengan baik, ada kemungkinan aset akan terkumpul dan tidak digunakan sesuai peruntukannya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas masih kurang dalam praktik pengelolaan aset. Aset yang tidak dimanfaatkan meningkatkan biaya administrasi dan pemeliharaan serta menghambat potensi ekonomi daerah untuk meningkatkan PAD. Oleh karena itu, aset idle seharusnya dianggap sebagai potensi strategis yang dapat diubah menjadi sumber daya produktif jika dikelola secara berkelanjutan dan sistematis.

Strategi optimalisasi yang dapat diterapkan untuk optimalisasi, seperti meningkatkan sistem informasi pengelolaan aset yang berbasis digital, mempercepat penyelesaian masalah legalitas, menata administrasi yang terintegrasi, dan membuat rencana pemanfaatan melalui mekanisme sewa, kerja sama pemanfaatan, dan pihak ketiga. Komitmen kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengawasan yang konsisten diperlukan untuk menerapkan strategi tersebut. Optimasi aset idle bisa menumbuhkan kemandirian keuangan publik serta menunjang pengembangan wilayah yang berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang baik jika dilakukan secara sistematis dan menyeluruh.

Referensi

- Anartany, S. M., & Suseno, D. A. (2018). *Strategi Optimalisasi Aset Idle Daerah Provinsi Jawa Tengah*. 7(1).
 Jurnal, B., Pengaruh, A., Aset, M., Roziq, A., Ekonomi, F., Jember, U., Sularso, R. A.,
 Ekonomi, F., & Jember, U. (2018). *OPTIMALISASI ASET IDLE SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI KASUS PADA SATUAN KERJA KPKNL JEMBER)* *Aan Kurniyanta*. 12(1), 131–144.
 Jurnal, J., Mea, I., Kasus, S., Optimalisasi, S., Pada, A., & Abc, P. T. (2024). *JIMEA | Jurnal*

- Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi)*. 8(1), 232–245.
- Letjend, J., & No, S. (2020). *ANALISIS OPTIMALISASI EKS BMN IDLE (Studi Kasus Eks BMN Idle Berupa Tanah Dan Bangunan Rumah Negara Golongan*. 31, 15–29.
- Made, N., Wardani, S., Puji, U., & Nugroho, H. (n.d.). *Analisis Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Kabupaten Pandeglang*. 3(19), 262–271.
- Manajemen, J. S. (2024). *JSMA (Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi) Volume 16 No. 2 / November / 2024*. 16(2), 228–241.
- Penghapusan, A., Milik, B., Alat, N., Melalui, K., Penjualan, M., Of, A., & Of, D. (2023). *No Title*.
- Raya, J., Sumedang, B., & Jatinangor, K. (n.d.). *Optimalisasi Pemanfaatan Aset Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Affiliation : 2019*, 144–155.
- Studies, G. (2018). *No Title*. 2, 391–411.
- Syariah, A., & Hellyanita, D. (2025). *Devi hellyanita*.